

TESIS

**PERAN APIP INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG
PISAU ATAS PROSES PENYALURAN, PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PULANG PISAU
(Analisis Terhadap Permendagri Nomor 73 Tahun 2020
Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa)**



Oleh

**FAHRURRAZI
NIM. 2220215310010**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**PERAN APIP INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG
PISAU ATAS PROSES PENYALURAN, PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PULANG PISAU
(Analisis Terhadap Permendagri Nomor 73 Tahun 2020
Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa)**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh
Fahrurrazi
NIM. 2220215310010**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

Judul Tesis : Peran APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Atas Proses Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Analisis Terhadap Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa)

Nama : Fahrurrazi
NIM : 2220215310010

Disetujui,

Pembimbing



Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
NIP. 19610621 199003 1 001

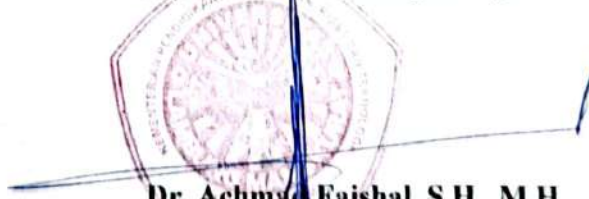
Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

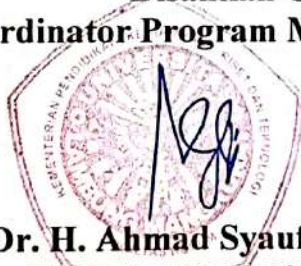
Tesis Ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal

Pembimbing



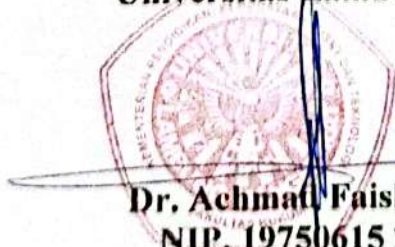
Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
NIP. 19610621 199003 1 001

Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 26 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Anggota : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H

MOTTO

SELESAIKANLAH APA YANG SEDANG KAU KERJAKAN
KERJAKANLAH SAMPAI SELESAI APA YANG
YANG TELAH KAU RENCANAKAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahrurrazi
NIM : 2220215310010
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Fahrurrazi
NIM. 2220215310010

FAHRURRAZI. 2024. "PERAN APIP INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU ATAS PROSES PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU (Analisis Terhadap Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa)". Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. 114 halaman.

RINGKASAN

Transfer Keuangan Desa yang terus meningkat dari tahun ketahun membuat Pemerintahan Daerah melalui institusi Pengawasannya harus lebih ekstra untuk mengawal agar proses penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa tersebut sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan data dari Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau atas hasil pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, masih terdapat temuan dari tahun ke tahun, baik temuan yang bersifat administrasi maupun temuan yang bersifat kerugian. Hal ini menunjukkan belum optimalnya peran APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam mengawal proses penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Pasal 6 Ayat (1) Permendagri Nomor 73 tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh APIP dilaksanakan dalam bentuk : 1). Reviu; 2). Monitoring; 3). Evaluasi; 4). Pemeriksaan, dan 5). Pengawasan Lainnya, termasuk didalamnya melaksanakan pemantauan proses penyaluran keuangan desa.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan pengawasan penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa apakah telah mempedomani Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, serta untuk mengetahui langkah-langkah efektif APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam upaya optimalisasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen/kepuustakaan, wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menemukan bahwa, APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau belum menjalankan perannya sesuai Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tidak melakukan pemantauan atau monitoring dalam proses penyaluran keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian lebih lanjut ditemukan bahwa APIP Inspektorat Kabupaten

Pulang Pisau tidak menentukan sampling objek pemeriksaan berdasarkan skala prioritas, tetapi hanya dilakukan melalui analisis intern yang sifatnya kurang memadai, sehingga tidak mampu mengidentifikasi dan memetakan area Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan. APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau juga belum optimal menjalankan perannya selaku *quality assurance*, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, ruang lingkup pengawasan APIP atas pengelolaan keuangan desa salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi, Pendidikan dan pelatihan, serta pembimbingan dan konsultasi terkait keuangan desa. Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa kondisi tersebut dikarenakan minimnya jumlah Sumber Daya Manusia / Pegawai dan minimnya anggaran yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau. Langkah efektif APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam upaya optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan keuangan desa dilakukan melalui pengusulan penambahan jumlah Sumber Daya Manusia dan penambahan anggaran serta mengawal proses pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Dari hasil penelitian, Penulis memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau perlu kiranya melakukan revisi atas regulasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dengan memuat hal yang berkaitan dengan sanksi yang diberikan kepada APIP apabila APIP tidak melakukan pemantauan atas proses penyaluran keuangan desa. Perlunya komitmen bersama dari kepala daerah dan kepala Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau untuk dapat memenuhi jumlah sumber daya manusia dan anggaran yang ideal bagi APIP dalam melaksanakan fungsi-fungsi pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat dipedomani secara komprehensif oleh APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

FAHRURRAZI. 2024. “Peran APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Atas Proses Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Analisis Terhadap Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa)”. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.114 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : APIP, Pengawasan, Keuangan Desa, Penyaluran, Pengelolaan, Pertanggungjawaban.

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dapat diartikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui dan menganalisis bagaimana peran APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau atas proses Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, dan 2) Mengetahui Langkah-Langkah Efektif APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan atas proses penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis dengan metode penelitian hukum normatif-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, wawancara dan observasi. Dari hasil analisis data ditemukan bahwa peran APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam proses penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau belum optimal dan belum sesuai permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tidak melakukan monitoring dalam proses penyaluran keuangan desa. Pemeriksaan yang dilakukan APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau lebih menekankan pada pemeriksaan yang sifatnya regular daripada pengawasan yang sifatnya pembinaan seperti sosialisasi, pendidikan dan pelatihan. Adapun Langkah efektif APIP dalam rangka optimalisasi dalam pengawasan keuangan desa yaitu dengan mengupayakan penambahan pegawai, penambahan anggaran, dan peningkatan kompetensi pegawai sehingga APIP diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pembinaan dan *early warning system*.

FAHRURRAZI. 2024. *“The Role of APIP Inspectorate of Pulang Pisau Regency on the Process of Distribution, Management and Accountability of Village Finances in the Regional Government of Pulang Pisau Regency (Analysis of Permendagri Number 73 of 2020 concerning Supervision of Village Financial Management)”*. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. **Advisor: Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.** 114 pages.

ABSTRACT

Keywords: *APIP, Supervision, Village Finance, Distribution, Management, Accountability*

Supervision of Village Financial Management can be defined as efforts, actions, and activities aimed at ensuring that Village Financial Management runs transparently, accountably, with orderly budgetary discipline, and is participatory by statutory provisions. The research conducted here aims to: 1) Identify and analyze how the role of the APIP Inspectorate of Pulang Pisau Regency in the process of Distribution, Management, and Accountability of Village Finances in the Pulang Pisau Regency, whether it is following the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 73 of 2020 concerning Supervision of Village Financial Management, and 2) Knowing the Effective Steps of APIP Inspectorate of Pulang Pisau Regency to optimize guidance and supervision over the process of distribution, management and accountability of village finances in Pulang Pisau Regency. This research uses statutory and sociological approaches with normative-empirical legal research methods. Data collection techniques were carried out through document studies, interviews, and observations. From the results of data analysis, it was found that the role of the APIP Inspectorate of Pulang Pisau Regency in the process of channeling, managing, and accounting for village finances in the Pulang Pisau Regency was not optimal and was not following Regulation of the Minister of Home Affairs Number 73 of 2020 concerning Supervision of Village Financial Management. APIP Inspectorate of Pulang Pisau District did not monitor the process of distributing village finances. Examinations conducted by the APIP Inspectorate of Pulang Pisau Regency emphasize regular examinations rather than supervision, such as guidance through socialization, education, and training. APIP's effective steps to optimize the supervision of village finances are seeking additional employees, budgets and increasing employee competence so that APIP is expected to be able to carry out coaching activities and early warning system.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul **“PERAN APIP INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU ATAS PROSES PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU (Analisis Terhadap Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa)”** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda mulia Nabi Besar Muhammad SAW karena berkat beliau, kita umat manusia dapat merasakan cahaya Islam untuk diimani, dipelajari serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Terselesaikannya penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua Tercinta Penulis, yang telah membesarkan dan merawat penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan semangat yang tiada henti baik secara moral maupun materiil untuk kesuksesan Penulis;
2. Almarhum Ayahanda Penulis, yang sempat menyaksikan Penulis kuliah namun tidak sempat menyaksikan Penulis menyelesaikan penulisan Tesis ini, Penulis mendoakan semoga “Abah” berada disurganya Allah SWT.
3. Isteri Tercinta Penulis, Khairunnisa, S.Si., M.M. yang selalu memberikan doa dan dukungan semangat yang tiada henti selama Penulis menempuh Pendidikan sampai menyelesaikan penulisan Tesis ini;
4. Anak-anak Babah tersayang : Ghina Kamilatun Nisa, Azrina Raziya Shazfa dan Hafidz Zaidan Hidayat, yang selalu memberikan semangat dengan kelucuannya.

5. Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
6. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus sebagai Dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang positif kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini;
7. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Bapak Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. selaku Pembimbing Tesis Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya di sela-sela kesibukan beliau untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini;
9. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang berharga dan positif bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
10. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang berharga dan positif bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
11. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan mengenai teori-teori hukum serta tuntunan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis;
12. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum serta seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu penulis untuk melayani keperluan akademik Penulis selama masa perkuliahan;
13. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu penulis untuk memperoleh bahan-bahan kepustakaan dalam penulisan tesis ini;

14. Kakak dan Adik-Adik Penulis, Suryadi, Sri Handayani dan Akhmad Husairi yang selalu memberikan dukungan, doa serta semangat kepada Penulis;
15. Untuk sahabat yang menjadi bagian perjalanan suka-duka selama masa perkuliahan berlangsung, Kepada Sulis Handoyo, Danang, Apta, Ori, dan Riza yang sudah memberikan semangat dan dukungan hingga akhir penulisan Tesis ini;
16. Teman-teman seangkatan dalam Program Kekhususan Hukum Tata Negara angkatan 2022, yang telah memberikan dukungan dan masukan serta informasi kepada Penulis;
17. Teman-teman angkatan 2022 Program Pascasarjana yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, saran, masukan dan motivasi selama ini;
18. Bapak dan Ibu di jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau yang membantu Penulis dalam memberikan informasi dan data-data penelitian selama Penulis menyusun penulisan Tesis ini;
19. Serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan Tesis ini.

Semoga semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penulisan Tesis ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, amin yarobbal alamin.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Sedikit harapan Penulis terkait tesis yang sederhana ini semoga dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan penelitian tesis ini.

Banjarmasin Juli 2024

Penulis,

Fathurrazi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	10
	C. Keaslian Penelitian.....	10
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
	1. Tujuan Penelitian.....	14
	2. Kegunaan Penelitian.....	14
	E. Tinjauan Pustaka.....	16
	1. Tinjauan Teoritis.....	16
	a. Teori Efektivitas Hukum.....	16
	b. Teori Peran.....	19
	c. Teori Kebijakan Publik.....	25
	2. Tinjauan Konseptual.....	27
	a. Peran.....	27
	b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).....	29
	c. Pengawasan.....	29
	d. Pengelolaan Keuangan Desa.....	31
	F. Metode Penelitian.....	33
	G. Sistematika Penulisan.....	41
BAB II	PERAN APIP INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU ATAS PROSES PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA DIANALISIS DARI PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.....	43
	A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	44
	B. Peran APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah.....	56
	C. Peran APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau atas proses penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau dianalisis dari Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.....	69

BAB III	LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN OLEH APIP INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU DALAM RANGKA OPTIMALISASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PROSES PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA DI WILAYAH KABUPATEN PULANG PISAU.....	96
	A. Langkah-langkah Efektif APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam Proses Penyaluran Keuangan Desa.....	96
	B. Langkah-Langkah Efektif APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam Proses Pengawasan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.....	105
BAB IV	PENUTUP.....	112
	A. Kesimpulan.....	112
	B. Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP